



Pengarah

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Kepala Badan Keahlian DPR

## Penanggungjawab

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA, PQIA

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara -

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penulis

Adhi Prasetyo

Ervita Luluk Zahara, S.E., M.E.

Indah Pranchiska, S.E.

# KAJIAN PAGU ANGGARAN RAPBN TA 2026 KOMISI VII



Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

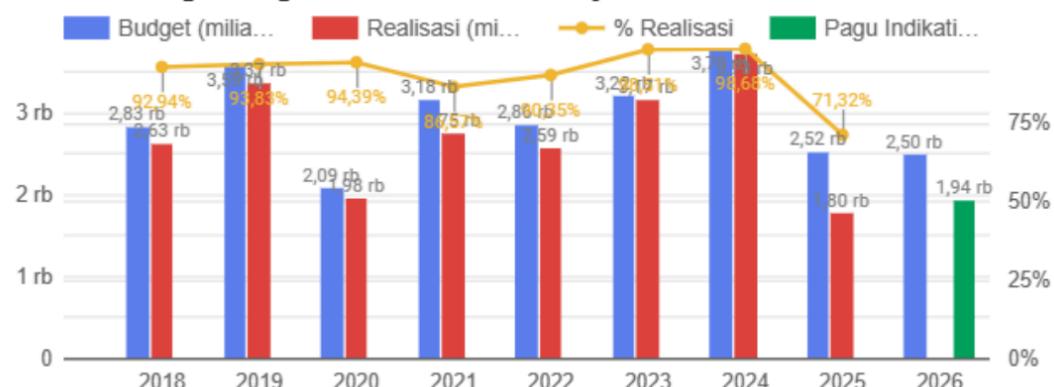
**2.501,80**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**1.936,80**

Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



### Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

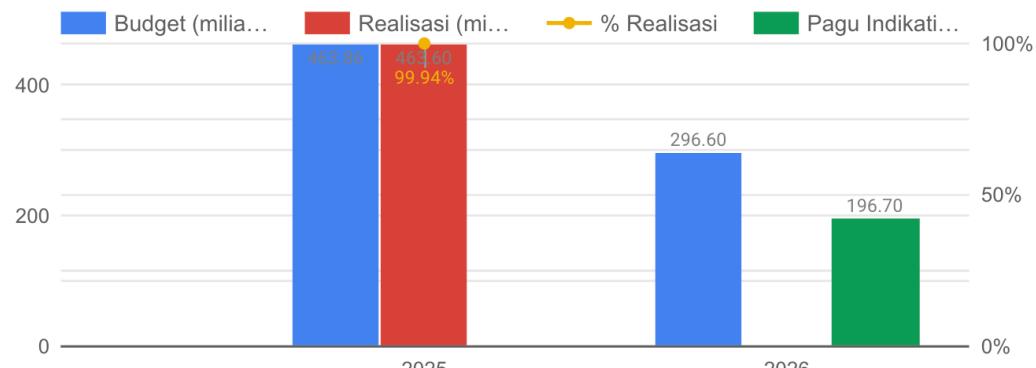
Program	Year / Budget (miliar Rp) / Realisasi (miliar Rp)								
	2026		2025		2024		2023		
Budget...	Realis...	Budge...	Realis...	Budge...	Realis...	Budge...	Realis...	Budge...	Realis...
Program Dukungan Manajemen	1.655	-	1.656,09	1.398,7	1.580,5	1.619,2	1.510,51	1.408,9	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	729,6	-	668,09	308	1.753,26	1.682,2	1.214,6	1.287,1	
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	117,2	-	195,43	90,3	450,03	432,4	491,9	473	
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total keseluruhan	2.501,8	0	2.519,61	1.797	3.783,8	3.733,8	3.217,01	3.169	

\* ) Angka Budget 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025. \*\* ) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook 2025 bersumber dari NK RAPBN 2026

- Pagu anggaran Kementerian Perindustrian dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp2.501,8 miliar. Dari total anggaran tersebut, alokasi sebesar 26,4% direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional, 43,2% untuk belanja pegawai, 14,6% untuk belanja operasional, dan 15,8% untuk prioritas lainnya. Kebijakan strategis yang akan dijalankan mencakup hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan (kelapa, sawit, rumput laut, garam, nikel, tembaga, bauksit, dan lain-lain), serta pengembangan industri prioritas seperti semikonduktor, kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB), tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kosmetik, farmasi, mesin dan peralatan, dirgantara, hingga jasa industri.
- Kebijakan strategis Kementerian Perindustrian pada periode 2027–2029, sesuai RPJMN 2025–2029, diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Fokus utama meliputi: peningkatan kualitas SDM industri melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan IKM sebagai bagian rantai pasok, hilirisasi industri berbasis SDA, pengembangan industri prioritas, peningkatan produktivitas melalui inovasi dan teknologi, percepatan transformasi industri hijau, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, serta pembangunan aglomerasi melalui kawasan industri.
- Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024, secara umum, Kementerian Perindustrian mencatat berbagai capaian positif sepanjang tahun 2024. Namun, masih terdapat sejumlah indikator kinerja strategis yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:
  1. Dari sisi makro, indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas tahun 2024 hanya mencapai 4,75%, masih di bawah target sebesar 5,80%. Persentase tersebut masih jauh di bawah target Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non migas, yang ditargetkan menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024. Demikian pula, kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional tercatat sebesar 17,16%, belum memenuhi target 17,90%. Kinerja ini mencerminkan bahwa peran strategis industri pengolahan sebagai pengungkit utama perekonomian masih belum maksimal, antara lain disebabkan oleh ketergantungan bahan baku impor, ketidakpastian global, dan rendahnya penetrasi pasar ekspor untuk produk teknologi tinggi.
  2. Indikator lainnya yang belum tercapai meliputi aspek ketenagakerjaan dan produktivitas. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja nasional hanya mencapai 13,80% dari target 14,29%. Selain itu, produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas terealisasi sebesar Rp120 juta per orang per tahun, sedikit lebih rendah dari target Rp122,3 juta. Begitu pula dengan utilisasi kapasitas sektor industri, yang hanya mencapai 65,3% dari target 70,2%, menandakan bahwa kapasitas produksi industri belum dimanfaatkan secara optimal.

- Dalam konteks transformasi industri menuju era 4.0, kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi juga belum menunjukkan hasil signifikan. Adapun realisasi sebesar 11,95% masih di bawah target 13,70%, mencerminkan tantangan dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk berbasis teknologi tinggi. Di sisi lain, program substitusi impor belum sepenuhnya berhasil. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar -4,58 atau tidak mencapai target berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 35%.
- Dari sisi pengembangan wilayah industri, Kementerian Perindustrian juga belum sepenuhnya mencapai target. Jumlah kawasan industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi hanya mencapai 4 dari target 5 kawasan (capaian 80%), dan kawasan industri prioritas di luar Jawa yang beroperasi adalah sebanyak 16 dari 17 kawasan (capaian 94,12%). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses perizinan, penyediaan infrastruktur, serta dukungan investasi di luar wilayah Jawa.
- Untuk memperkuat peran industri pengolahan sebagai motor penggerak ekonomi nasional, Komisi VII DPR RI perlu mendorong Kementerian Perindustrian untuk mengambil langkah-langkah strategis melalui:
  1. percepatan hilirisasi sumber daya alam lokal dan diversifikasi bahan baku harus dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor;
  2. peningkatan kualitas SDM industri menjadi kunci dalam aspek ketenagakerjaan dan produktivitas, terutama melalui pendidikan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri prioritas, disertai program reskilling dan upskilling sektor padat karya seperti alas kaki dan tekstil, perlu digalakkan agar produktivitas meningkat sesuai standar global. Optimalisasi kapasitas produksi yang masih idle juga harus dilakukan dengan dukungan integrasi IKM ke rantai pasok industri besar;
  3. transformasi industri 4.0 perlu ditopang oleh penguatan ekosistem inovasi, dukungan riset dan teknologi, serta insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi dalam digitalisasi dan otomasi. Kebijakan substitusi impor juga harus difokuskan pada produk strategis seperti komponen kendaraan listrik, mesin, dan farmasi;
  4. pengembangan kawasan industri di luar Jawa perlu dipercepat melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan pelabuhan menjadi prasyarat utama. Penyederhanaan perizinan juga mutlak dilakukan melalui integrasi OSS dengan sistem perizinan daerah, sehingga kawasan industri dapat lebih cepat beroperasi.

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

**296,6**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**196,7**

Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

### Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program



### Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

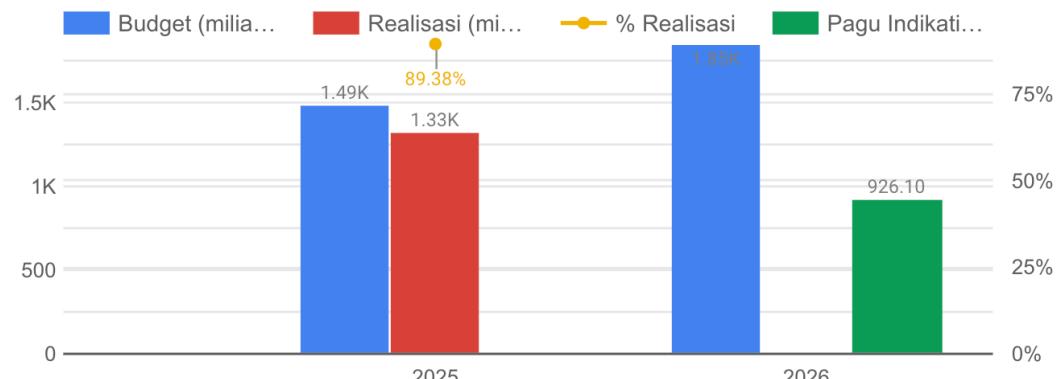
Program	2026		2025	
	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)
Program Dukungan Manajemen	268.5	-	298.08	260.8
Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan	28.1	-	165.78	202.8
<b>Grand total</b>	<b>296.6</b>	<b>0</b>	<b>463.86</b>	<b>463.6</b>

\* Angka Budget 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025. \*\*) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook 2025 bersumber dari NK RAPBN 2026

- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) adalah entitas baru yang dibentuk pada 2024 dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai bagian dari restrukturisasi kelembagaan negara. Kehadiran kementerian ini merupakan tonggak penting untuk memperkuat fokus pemerintah pada pengembangan ekosistem UMKM dan kewirausahaan, yang memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian UMKM menjalankan dua program utama. Program Dukungan Manajemen difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, penyediaan data dan informasi terintegrasi mengenai UMKM, serta peningkatan kapasitas aparatur yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan diarahkan pada pemberdayaan UMKM melalui berbagai instrumen, mulai dari fasilitasi akses pembiayaan, pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan dan digital, hingga dukungan untuk mencetak wirausaha baru.
- Arah kebijakan Kementerian pada tahun 2026 sejalan dengan RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya penciptaan ekosistem UMKM yang kondusif dan inklusif. Fokus kebijakan mencakup penguatan basis data UMKM nasional sebagai instrumen perencanaan, peningkatan akses pembiayaan melalui perbankan, lembaga keuangan, maupun BUMN pembiayaan ultra mikro, serta pengembangan kewirausahaan baru yang berbasis pada inovasi dan digitalisasi. Selain itu, kementerian juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi pasar domestik dan global, sekaligus mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih program dan intervensi.
- Sasaran kinerja yang ditetapkan meliputi peningkatan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto nasional, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam bidang literasi digital dan keuangan. Pemberdayaan juga dilakukan melalui model pendampingan berbasis komunitas, sehingga dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mampu memberdayakan pelaku usaha secara berkelanjutan.
- Pada tahun 2025, Kementerian UMKM memperoleh alokasi anggaran Rp463,86 miliar, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja, disepakati penghematan sebesar Rp242,90 miliar atau 52,4 persen, sehingga pagu efektif yang dapat dimanfaatkan sekitar Rp221 miliar. Outlook realisasi anggaran 2025 tercatat mencapai Rp463,60 miliar atau 99,94 persen dari pagu, yang menunjukkan daya serap tinggi meski terdapat efisiensi signifikan. Struktur program 2025 terbagi ke dalam dua program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen Rp298,08 miliar (64,3%) dan Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan Rp165,78 miliar (35,7%). Dari sisi belanja, komposisi masih sangat didominasi oleh belanja pegawai sebesar 72,6 persen, sementara sisanya dialokasikan untuk belanja barang dan modal.

- Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pagu anggaran Kementerian UMKM tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp296,60 miliar. Angka ini lebih tinggi dibanding pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp196,70 miliar, menunjukkan adanya tambahan dukungan fiskal bagi penguatan kelembagaan dan program kementerian. Distribusi program pada 2026 meliputi Program Dukungan Manajemen Rp268,50 miliar (90,6%) dan Program UMKM dan Kewirausahaan Rp28,10 miliar (9,4%). Komposisi ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, kementerian masih fokus pada konsolidasi kelembagaan dan penguatan fondasi tata kelola, meskipun ruang fiskal untuk program substantif pemberdayaan UMKM tetap tersedia.
- Meskipun pagu 2026 lebih rendah dibanding alokasi awal 2025, penyerapan yang tinggi pada tahun sebelumnya dan tambahan dukungan anggaran dari indikatif ke definitif menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga momentum konsolidasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan operasional yang besar dengan stimulus nyata bagi pelaku UMKM, agar program kementerian tidak hanya memperkuat internal, tetapi juga langsung menyentuh masyarakat.
- Dengan dukungan DPR RI, khususnya Komisi VII, Kementerian UMKM diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi 2026 untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta meningkatkan daya saing UMKM nasional. Langkah-langkah strategis ini krusial agar kementerian baru ini mampu tumbuh menjadi aktor kunci dalam mewujudkan struktur ekonomi yang lebih inklusif, berdaya tahan, dan berpihak pada pelaku usaha kecil.
- Secara keseluruhan, Kementerian UMKM diharapkan mampu berperan sebagai katalis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih inklusif, berdaya tahan, dan berpihak pada rakyat kecil. Melalui penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi keuangan, serta dukungan terhadap kewirausahaan baru, kementerian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

**1.851,7**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp) Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program

**926,1**

Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026



Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

Program	2026		2025	
	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)
Program Dukungan Manajemen	963.6	-	787.41	697.5
Program Pariwisata	604	-	396.75	399.9
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	284.1	-	304.58	233.2
<b>Grand total</b>	<b>1,851.7</b>	<b>0</b>	<b>1,488.74</b>	<b>1,330.6</b>

\*) Angka Budget 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025. \*\*) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook 2025 bersumber dari NK RAPBN 2026

- Pada tahun 2025, sebagai tahun pertama pasca pemisahan, Kementerian Pariwisata mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp1.488,74 miliar. Dari alokasi tersebut, dilakukan efisiensi sebesar Rp603,80 miliar atau 40,6 persen, sehingga realisasi diproyeksikan mencapai Rp1.330,6 miliar atau 89,38 persen dari pagu. Struktur program pada 2025 menunjukkan bahwa mayoritas anggaran dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp787,41 miliar, Program Pengembangan Pariwisata Rp396,75 miliar, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp304,58 miliar. Dari sisi belanja, proporsinya didominasi belanja barang 61,3 persen, pegawai 22,8 persen, dan modal 15,9 persen. Angka-angka ini menggambarkan orientasi awal kementerian dalam memperkuat kelembagaan sekaligus menjaga kesinambungan layanan pariwisata di tengah kebijakan efisiensi.
- Memasuki tahun 2026, pagu anggaran Kementerian Pariwisata meningkat signifikan menjadi Rp1.851,70 miliar. Peningkatan ini memberi ruang bagi konsolidasi kelembagaan sekaligus akselerasi program prioritas pasca tahun transisi 2025. Alokasi anggaran terbagi atas Program Dukungan Manajemen Rp963,6 miliar atau 52,0 persen, Program Pariwisata Rp604,0 miliar atau 32,6 persen, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp284,1 miliar atau 15,4 persen. Dari sisi jenis belanja, tahun 2026 didominasi oleh belanja pegawai Rp1.319,3 miliar atau 71,3 persen, diikuti belanja barang Rp384,0 miliar atau 20,5 persen, serta belanja modal Rp248,3 miliar atau 8,2 persen.
- Dibandingkan dengan struktur tahun 2025, terjadi pergeseran penting: dominasi belanja bergeser dari barang menjadi pegawai, seiring kebutuhan penguatan aparatur baru pasca pemisahan kelembagaan. Namun, alokasi belanja modal masih relatif kecil sehingga perlu perhatian lebih agar pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata dapat terakselerasi.
- Sejalan dengan RPJMN 2025–2029, arah kebijakan Kementerian Pariwisata difokuskan pada transformasi sektor pariwisata melalui penguatan destinasi super prioritas, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Fokus ini juga mencakup sinergi lintas sektor untuk memperkuat promosi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pariwisata semakin luas. Kementerian Pariwisata juga diarahkan untuk mendorong transformasi digital melalui Tourism 5.0, mendukung program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), dan memperkuat SDM pariwisata melalui pendidikan vokasi serta pelatihan berbasis desa wisata. Sinergi lintas sektor, khususnya dalam aksesibilitas transportasi dan keterhubungan antar-destinasi, menjadi krusial untuk memastikan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Dengan dukungan anggaran yang meningkat pada tahun 2026, Kementerian Pariwisata diharapkan mampu mempercepat pencapaian target peningkatan kontribusi devisa, perluasan lapangan kerja, serta memperkuat citra pariwisata Indonesia di kancah internasional.
- Dengan peningkatan anggaran dari Rp1.488 triliun pada pagu indikatif 2025 menjadi Rp1.852 triliun dalam RAPBN 2026, Kementerian Pariwisata memperoleh peluang memperluas skala intervensi program. Tantangan yang tersisa adalah menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan, memastikan keberlanjutan quick wins 2025, serta mendorong agar tambahan anggaran benar-benar memperkuat kontribusi pariwisata terhadap PDB, lapangan kerja, dan devisa nasional.

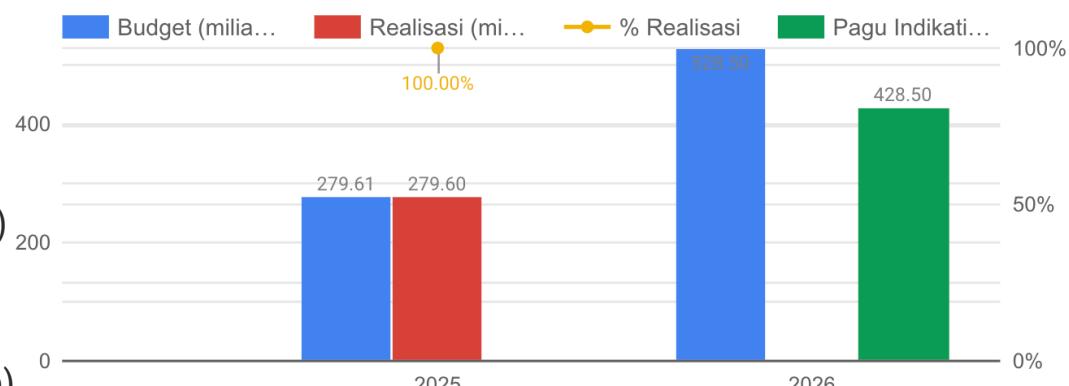
Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

**528,5**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

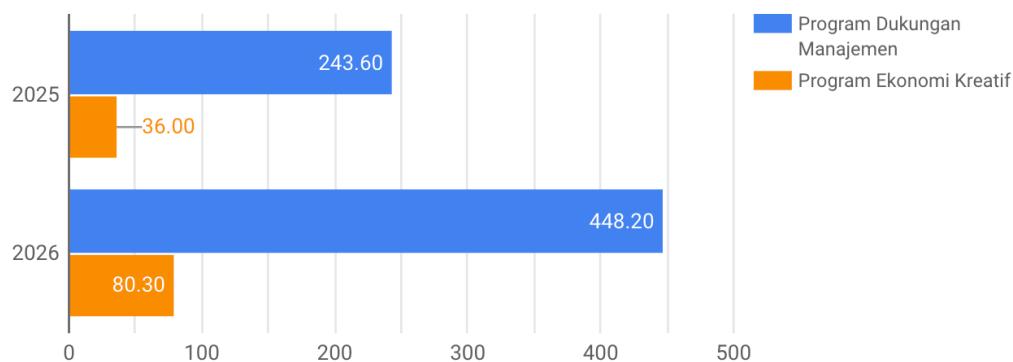
**428,5**

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

### Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program



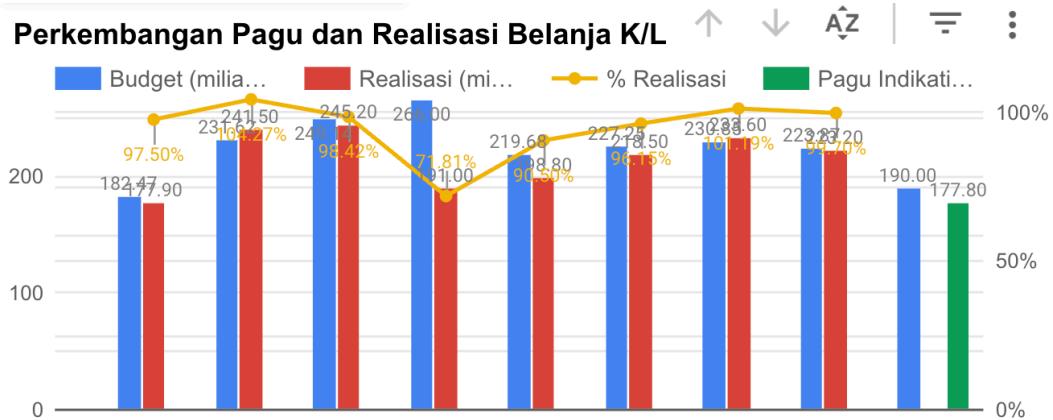
### Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

Program	2026		2025	
	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)
Program Dukungan Manajemen	448.2	-	243.6	243.6
Program Ekonomi Kreatif	80.3	-	36	36
<b>Grand total</b>	<b>528.5</b>	<b>0</b>	<b>279.61</b>	<b>279.6</b>

\*) Angka Budget 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025. \*\*) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook 2025 bersumber dari NK RAPBN 2026

- Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif merupakan lembaga baru hasil pemisahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 dan Nomor 200 Tahun 2024. Dalam mendukung prioritas pembangunan, kegiatan Kementerian Ekonomi Kreatif diarahkan untuk berkontribusi pada Prioritas Nasional Tiga, yaitu mengembangkan industri dan agromaritim yang berdaya saing. Peran aktif kementerian difokuskan pada pengembangan industri kreatif serta mendorong lahirnya industri agromaritim di sentra-sentra produksi. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui upaya memperkuat ekosistem usaha, memfasilitasi akses permodalan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kreatif, serta mendorong dukungan inovasi dan teknologi agar subsektor ekonomi kreatif mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.
- Program pembangunan yang dijalankan Kementerian Ekonomi Kreatif terbagi ke dalam dua rumpun besar. Program Dukungan Manajemen diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan efektif melalui penyediaan layanan manajemen, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan tata kelola kelembagaan. Sementara itu, Program Ekonomi Kreatif ditujukan secara langsung untuk meningkatkan daya saing subsektor ekonomi kreatif dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Program ini dilaksanakan melalui inkubasi usaha, fasilitasi pembiayaan, penguatan ekosistem digital, serta promosi produk kreatif di pasar domestik maupun global.
- Sasaran pembangunan Kementerian Ekonomi Kreatif pada tahun 2026 diarahkan untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif, meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto nasional, memperluas daya saing subsektor ekonomi kreatif di pasar global, memperbesar jumlah pelaku usaha kreatif yang memperoleh akses pembiayaan dan inkubasi usaha, serta meningkatkan keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam pengembangan ekosistem kreatif.
- Dari sisi anggaran, pada tahun 2025 Kementerian Ekonomi Kreatif memperoleh alokasi sebesar Rp279,61 miliar. Namun sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga, terjadi penghematan sebesar Rp90,49 miliar atau 32,4 persen dari total pagu, sehingga anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan hanya Rp189,2 miliar. Meskipun demikian, tingkat realisasi anggaran 2025 tetap tinggi, hampir mencapai seratus persen, yang menunjukkan kesiapan kelembagaan baru dalam mengelola alokasi anggaran serta konsistensi dalam menyelesaikan program prioritas.
- Memasuki tahun 2026, pagu indikatif awal ditetapkan sebesar Rp428,50 miliar. Namun dalam pembahasan terbaru, pagu tersebut meningkat menjadi Rp528,50 miliar, naik sekitar 89 persen dibandingkan APBN 2025 dan bertambah Rp100 miliar dari pagu indikatif awal. Lonjakan ini memberi ruang konsolidasi kelembagaan sekaligus memperbesar kapasitas implementasi program inti.
- Menurut jenis belanja, pada tahun 2025 alokasi anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif masih didominasi oleh belanja barang sebesar Rp147,9 miliar atau 52,9 persen dari total pagu, diikuti oleh belanja pegawai sebesar Rp130 miliar atau 46,5 persen, serta belanja modal sebesar Rp1,7 miliar atau 0,6 persen. Komposisi tersebut mencerminkan orientasi awal kementerian dalam memastikan operasional kelembagaan pasca pembentukan baru.

- Memasuki tahun 2026, struktur belanja diarahkan untuk memperkuat program prioritas ekonomi kreatif dengan menyeimbangkan kebutuhan operasional kelembagaan dan stimulus program substantif. Perubahan ini menandai upaya konsolidasi kelembagaan sekaligus memperbesar ruang bagi intervensi yang langsung menyentuh pelaku dan subsektor ekonomi kreatif. Struktur alokasi anggaran 2026 menunjukkan dominasi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp448,20 miliar atau 87,1 persen, sementara Program Ekonomi Kreatif mendapat Rp80,30 miliar atau 12,9 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi untuk Program Ekonomi Kreatif mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat, dari Rp36 miliar menjadi Rp80,3 miliar, sehingga menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar pada program-program yang langsung menyentuh pelaku dan ekosistem kreatif.
- Kenaikan pagu anggaran 2026 memberikan sinyal positif bagi konsolidasi pasca pemisahan kelembagaan. Namun, komposisi yang masih didominasi oleh belanja operasional perlu secara bertahap diarahkan agar porsi program substantif semakin besar. Dengan begitu, dampak langsung terhadap pelaku dan sub sektor ekonomi kreatif dapat semakin terasa di lapangan.
- Namun, sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi. Kesenjangan antar subsektor ekonomi kreatif masih terasa, sementara implementasi Asta Ekraf sebagai kerangka pengembangan ekosistem belum sepenuhnya optimal. Akses pembiayaan dan infrastruktur bagi pelaku kreatif di berbagai daerah juga masih terbatas. Selain itu, sinergi dengan sektor pariwisata, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan benar-benar memberikan nilai tambah. Kapasitas kelembagaan yang relatif baru juga membutuhkan penguatan lebih lanjut agar mampu menampung skala program yang semakin besar.
- Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Ekonomi Kreatif pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan visi Indonesia Emas 2045 yang sejalan dengan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas transformasi dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Pengembangan tersebut menggunakan pendekatan rantai nilai yang komprehensif dan terintegrasi untuk melaksanakan program prioritas demi mencapai target indikator kinerja utama secara efektif. Rantai nilai ekonomikreatif mencakup lima tahapan strategis yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, dengan dukungan instrument kebijakan yang spesifik pada setiap tahapan melalui berbagai kegiatan dalam delapan Klaster Asta Ekraf, yaitu Ekraf Data, Ekraf Bijak, Talenta Ekraf, Infra Ekraf, Ekraf Kaya, Dana Ekraf, Pasar Ekraf, dan Sinergi Ekraf.
- Dengan dukungan anggaran yang meningkat pada tahun 2026, Kementerian Ekonomi Kreatif diharapkan mampu memperkuat kelembagaan pasca pemisahan, memperluas jangkauan program prioritas, serta meningkatkan kontribusi subsektor kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran kementerian ini juga diharapkan mampu memperkokoh identitas budaya bangsa melalui pengembangan talenta kreatif, promosi karya, dan perluasan akses produk kreatif di pasar global. Dukungan DPR RI, khususnya Komisi VII, sangat diperlukan agar kesinambungan pendanaan, efektivitas implementasi program, dan pencapaian target pembangunan nasional 2025-2029 dapat terjaga.



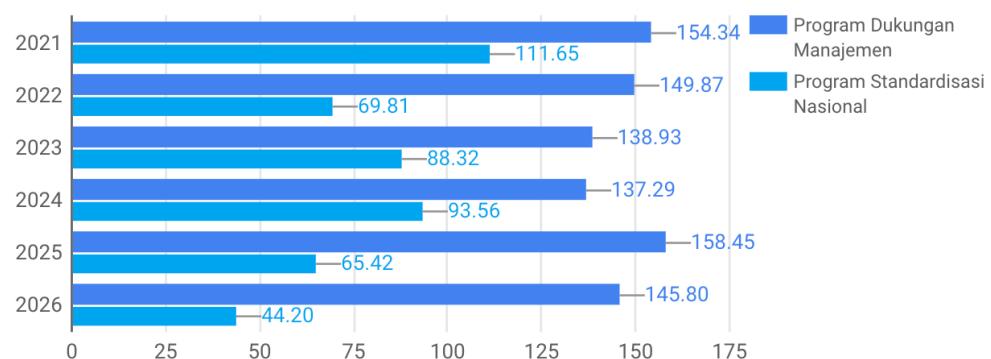
Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)  
**190**

### Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**177,8**

Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026



### Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

Program	Year / Budget (miliar Rp) / Realisasi (miliar Rp)							
	2026		2025		2024		2023	
Budget...	Realis...	Budge...	Realis...	Budge...	Realis...	Budge...	Realis...	
Program Dukungan Manajemen	145,8	-	158,45	158	137,29	147,8	138,93	138,1
Program Standardisasi Nasional	44,2	-	65,42	65,2	93,56	85,8	88,32	80,4
Total keseluruhan	190	0	223,87	223,2	230,85	233,6	227,25	218,5

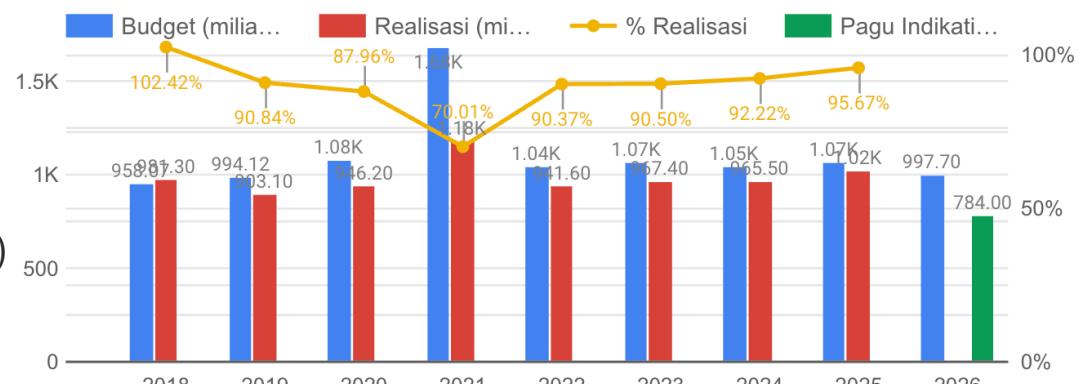
\* Angka Budget 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025. \*\*) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook 2025 bersumber dari NK RAPBN 2026

- Total pagu BSN TA 2026 sesuai pagu anggaran adalah sebesar Rp190 miliar, yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp144,1 miliar dan PNBP sebesar Rp45,9 miliar.
- Rincian pagu anggaran BSN Tahun Anggaran 2026 per jenis belanja: Belanja Operasional sebesar Rp144,1 miliar dan Belanja Non Operasional sebesar Rp45,9 miliar.
- Rincian output BSN yang teralokasi pada Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Tahun 2026 mendukung Prioritas Nasional 5 yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri”, Program Prioritas 05-Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar wilayah, dan Ekspor, serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.
- Terdapat sembilan rincian output Prioritas Nasional di Program Standardisasi Nasional yang telah teranggarkan berdasarkan SBPA mendukung Prioritas Nasional 05- Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yakni:
  1. Layanan pelatihan publik;
  2. Penilaian akreditasi laboratorium dan penyelenggaraan uji profisiensi;
  3. Penilaian akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
  4. Evaluasi asesmen akreditasi laboratorium dan lembaga sertifikasi;
  5. Sistem dan skema akreditasi;
  6. Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi;
  7. Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Termoelektrik dan Kimia;
  8. Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi; dan
  9. Diseminasi SNSU Termoelektrik dan Kimia.
- Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2024, tidak ada target sasaran strategis maupun indikator kinerja yang tidak tercapai. BSN menetapkan 12 indikator kinerja untuk 6 sasaran. Dimana semua indikator kinerja mencapai  $\geq 100\%$ , dan beberapa melebihi batas maksimal evaluasi (dibatasi 120%). Seluruh target kinerja telah tercapai bahkan sebagian besar melampaui target, baik di tingkat sasaran strategis maupun program.
- Beberapa contoh indikator yang jauh melebihi target: (a) Jumlah penambahan produk yang diakui dalam pengakuan internasional (CMC). Target 7 dan realisasi 20, artinya persentase capaian sebesar 285,71%, (b) Jumlah jenis produk yang telah ditetapkan SNI-nya dengan target 70 dan realisasi 102, artinya persentase capaian sebesar 145,71%.
- Meskipun kinerja BSN pada tahun 2024 memiliki capaian sangat tinggi secara kuantitatif (rata-rata capaian 128,16%, dan dibatasi menjadi 109,43%). Perlu menjadi perhatian adalah capaian yang berada di atas batas evaluasi bisa jadi mencerminkan perencanaan target yang terlalu konservatif atau pengaruh sinergi eksternal yang belum dihitung.

- Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VII DPR RI:

1. Dengan total pagu anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp190 miliar, yang terdiri dari belanja operasional Rp144,1 miliar dan belanja non-operasional Rp45,9 miliar, BSN perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, terutama dalam mendukung output yang telah teralokasi dalam Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) 2026.
2. Alokasi anggaran yang diarahkan pada sembilan rincian output Prioritas Nasional, seperti layanan pelatihan, akreditasi lembaga, pengembangan sistem akreditasi, sistem dan diseminasi standar SNSU, dan lain-lain, sebaiknya diperkuat dengan strategi implementasi yang lebih terukur agar memberikan dampak nyata terhadap hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah dalam negeri.
3. Capaian kinerja BSN tahun 2024 yang seluruhnya melampaui target, bahkan sebagian jauh di atas 120%, menunjukkan adanya konsistensi kinerja yang baik, namun juga menandakan perlunya evaluasi kembali dalam penetapan target agar lebih realistik, progresif, dan mencerminkan tantangan nyata. Hal ini penting untuk menghindari kesan bahwa target yang ditetapkan terlalu konservatif serta untuk mendorong pencapaian yang lebih berkualitas, tidak hanya kuantitatif. Untuk itu perlu upaya dalam menjaga kesinambungan capaian kinerja melalui penguatan tata kelola anggaran, peningkatan kualitas perencanaan target kinerja, serta memastikan bahwa setiap output program memberikan kontribusi langsung pada penguatan daya saing industri nasional dan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global.

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



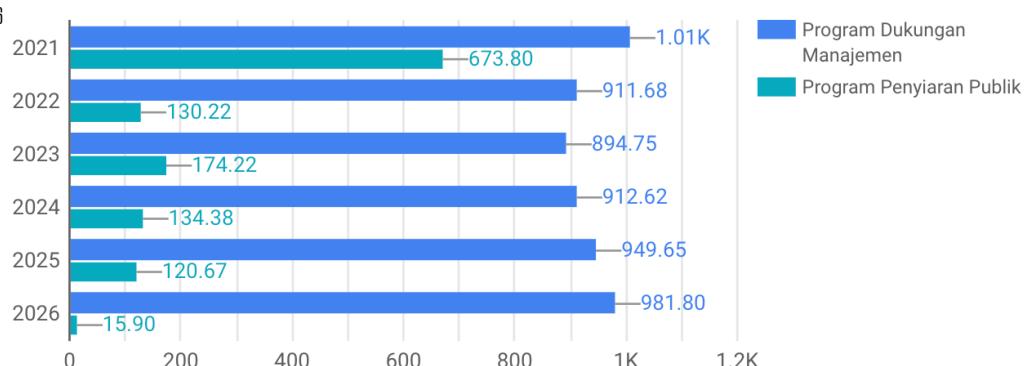
Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

**997,7**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**784**

### Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program



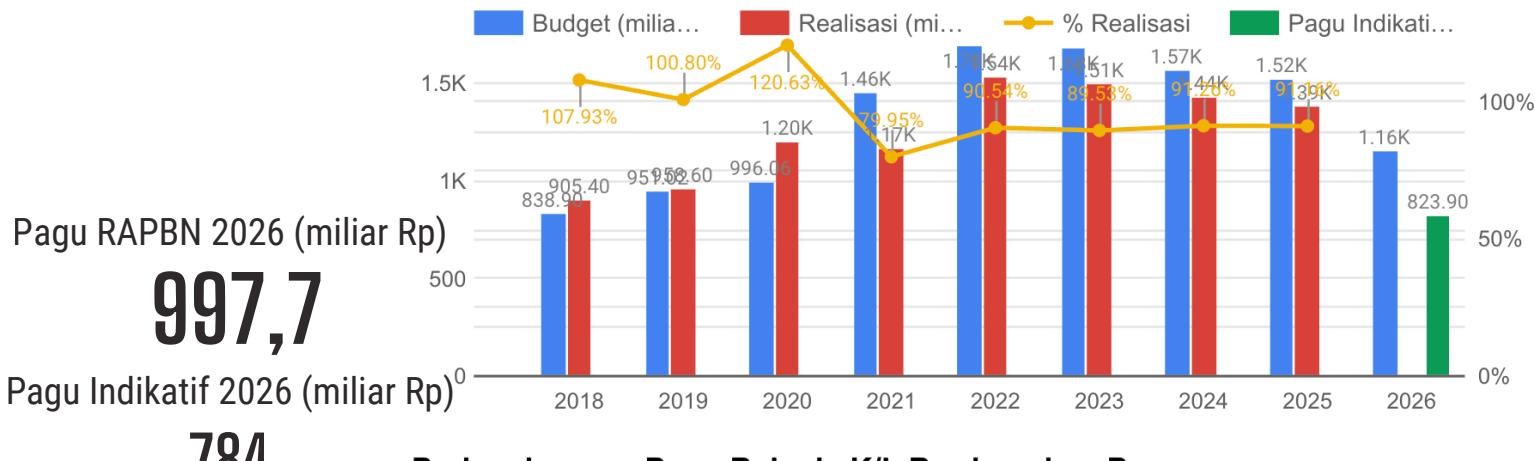
### Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

Program	Year / Budget (miliar Rp) / Realisasi (miliar Rp)							
	2026		2025		2024		2023	
Budget...	Realis...	Budge...	Realis...	Budge...	Realis...	Budge...	Realis...	
Program Dukungan Manajemen	981.8	-	949.65	879.8	912.62	853.7	894.75	832.6
Program Penyiaran Publik	15.9	-	120.67	144.2	134.38	111.8	174.22	134.8
<b>Grand total</b>	<b>997.7</b>	<b>0</b>	<b>1,070.31</b>	<b>1,024</b>	<b>1,047</b>	<b>965.5</b>	<b>1,068.96</b>	<b>967.4</b>

\*) Angka Budget 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025. \*\*) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook 2025 bersumber dari NK RAPBN 2026

- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) sebagai media radio publik bertugas menyajikan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta pelestarian budaya. RRI juga memegang fungsi penting sebagai kanal komunikasi publik yang inklusif, terutama karena jangkauannya yang mampu menembus wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
- Target yang ditetapkan RRI untuk tahun 2026 mencakup pencapaian peringkat 10 dalam penilaian layanan dan skor 4 dalam kepuasan pemangku kepentingan, dengan harapan jangkauan siaran mencapai 96%. Prioritas nasional yang tertera mencerminkan fokus pada layanan inklusif dan berbasis digital, dengan penekanan pada penyiaran komunitas dan sektor prioritas, sejalan dengan tren global menuju digitalisasi media. Strategi implementasi, seperti pengadaan pemancar FM baru dan dukungan peralatan pendukung, akan menjadi kunci dalam meningkatkan jangkauan siaran.
- Data jangkauan siaran menunjukkan bahwa RRI berhasil mencakup 89,49% dari total kabupaten/kota di Indonesia, dengan total 460 kabupaten/kota yang tercover. Dari segi luas wilayah, RRI mencakup 89,61% dari total luas wilayah nasional, dan menjangkau populasi sebesar 93,23% dari jumlah penduduk, yakni 251.912.806 orang. Namun, masih terdapat 54 kabupaten/kota (10,51%) yang belum tercover, mencakup populasi 18.291.111 orang (6,77%).
- Dalam konteks wilayah 3T, jangkauan siaran menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun demikian, terdapat 18 kabupaten/kota (20,22%) yang belum tercover, yang meliputi 17,21% luas wilayah dan 13,08% populasi. Secara keseluruhan, meskipun RRI telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam jangkauan siaran, masih ada tantangan untuk memperluas cakupan ke daerah yang belum tercover, terutama di wilayah 3T, guna memastikan pemerataan akses informasi dan layanan penyiaran di seluruh masyarakat Indonesia.
- Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VII DPR RI: Pertama, inovasi pengembangan program siaran perlu ditingkatkan guna memastikan RRI mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, relevan, dan diminati masyarakat. Upaya ini penting untuk mengurangi dominasi penyiaran ulang (re-run) yang dapat menurunkan daya tarik konten, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan hiburan yang segar serta berorientasi pada kepentingan publik. Kedua, efektivitas alokasi anggaran perlu dioptimalkan agar berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas produksi konten dan perluasan jangkauan layanan publikasi. Ketiga, revitalisasi infrastruktur dan sarana-prasarana penyiaran menjadi faktor krusial dalam memperluas cakupan media publikasi publik. Dengan modernisasi peralatan dan teknologi penyiaran, diharapkan dapat meningkatkan kualitas siaran sekaligus menjangkau masyarakat di wilayah 3T, sehingga fungsi pelayanan publik dapat dijalankan secara lebih optimal dan inklusif. Terakhir, penguatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah perlu terus ditingkatkan guna mendukung komunikasi publik. Kolaborasi strategis akan memperluas jangkauan pesan pembangunan, memperkuat penyebarluasan informasi pemerintah, serta mendukung promosi event daerah berbasis kearifan lokal, sehingga RRI dapat memainkan peran ganda sebagai media komunikasi pembangunan sekaligus pelestari budaya bangsa.

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

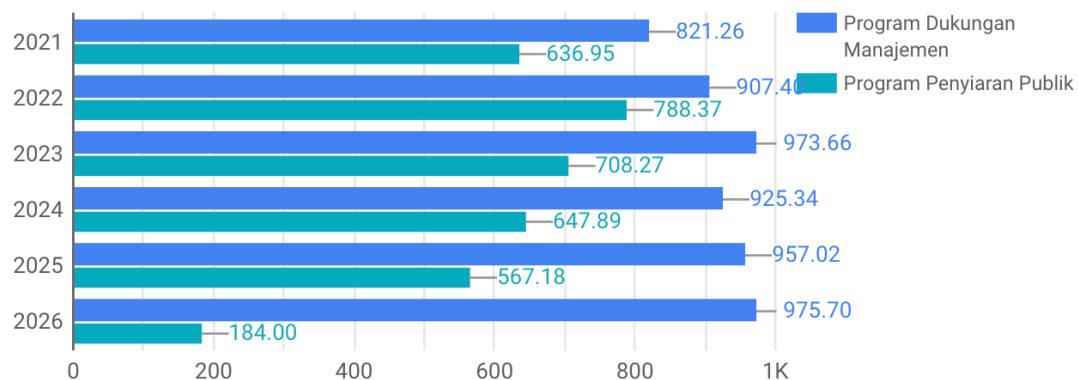
**997,7**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**784**

### Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program

Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026



### Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

Program	Year / Budget (miliar Rp) / Realisasi (miliar Rp)							
	2026		2025		2024		2023	
Budget...	Realis...	Budge...	Realis...	Budge...	Realis...	Budge...	Realis...	
Program Dukungan Manajemen	975.7	-	957.02	775.6	925.34	872.4	973.66	903.1
Program Penyiaran Publik	184	-	567.18	613.8	647.89	563.3	708.27	602.8
Grand total	1,159.7	0	1,524.2	1,389.4	1,573.23	1,435.7	1,681.94	1,505.9

\* ) Angka Budget 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025. \*\* ) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook 2025 bersumber dari NK RAPBN 2026

- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sebagai televisi publik bertugas untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan TVRI antara lain: turut berperan dalam agenda pembangunan Transformasi Ekonomi melalui Transformasi Digital yang tercermin dalam Rincian Output seperti: (1) Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan; (2) Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan; (3) Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; (4) Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan MediaBaru; (5) Siaran Informasi Publik Menuju Indonesia Emas; (6) Siaran Program Penguatan Ekonomi Kreatif; (7) Siaran Pendidikan Agama dan Budaya; (8) Konten Pendukung Transformasi Digital; Serta (9) Siaran Peningkatan Kesehatan dan Destinasi Wisata Berbasis Olahraga.
- TVRI memiliki beberapa program prioritas meliputi modernisasi infrastruktur siaran berbasis digital, pengembangan konten edukatif dan kultural yang relevan, serta penguatan fungsi sebagai kanal promosi ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata. Optimalisasi TVRI Digital dengan pendekatan multiplatform juga diposisikan sebagai langkah strategis untuk menjawab perubahan perilaku konsumsi media masyarakat.
- TVRI menghadapi tantangan signifikan dari disrupti teknologi media. Pergeseran audiens ke media sosial dan platform streaming global mengurangi daya jangkau siaran televisi konvensional. Selain itu, keterbatasan kapasitas produksi konten yang kompetitif, serta rendahnya kemampuan untuk menarik generasi muda sebagai audiens, menjadi tantangan struktural yang harus segera diatasi.
- Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VII DPR RI: Pertama, inovasi pengembangan program siaran perlu ditingkatkan guna memastikan TVRI mampu menghadirkan program siaran yang berkualitas, relevan, dan diminati masyarakat. Kedua, efektivitas alokasi anggaran perlu dioptimalkan agar berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas produksi konten dan perluasan jangkauan layanan publikasi. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran akan mendukung profesionalisme produksi, memperkuat daya saing TVRI, serta meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan informasi yang lebih merata kepada masyarakat. Ketiga, revitalisasi infrastruktur dan sarana-prasarana penyiaran menjadi faktor krusial dalam memperluas cakupan media publikasi publik. Dengan modernisasi peralatan dan teknologi penyiaran, diharapkan dapat meningkatkan kualitas siaran sekaligus menjangkau masyarakat di wilayah 3T, sehingga fungsi pelayanan publik dapat dijalankan secara lebih optimal dan inklusif. Terakhir, penguatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah perlu terus ditingkatkan guna mendukung komunikasi publik. Kolaborasi strategis akan memperluas jangkauan pesan pembangunan, memperkuat penyebarluasan informasi pemerintah, serta mendukung promosi event daerah berbasis kearifan lokal, sehingga LPP dapat memainkan peran ganda sebagai media komunikasi pembangunan sekaligus pelestari budaya bangsa.



**Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**